



Perangkat Desa Kuala Tolak Mengundurkan Diri

KETAPANG- Hampir semua Perangkat Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara (MHU) mengundurkan diri jabatan. Ada 11 perangkat desa mengundurkan diri karena sudah sejalan dengan kepala desanya.

Sekretaris Desa Kuala Tolak, Feriansyah, mengatakan ada 11 orang yang mengundurkan diri, termasuk dirinya. Mulai dari Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan serta empat kelapa dusun mengundurkan diri dari jabatan.

"Saya pribadi mengundurkan diri ini karena ketidakmampuan saya dan melihat regulasi yang ada, juga keadaan yang ada. Saya rasa mendingan saya mengundurkan diri," katanya usai mengikuti mediasi bersama kedes dan perangkat desa di Kantor Camat MHU, Kamis (14/7).

Menurut Feriansyah, selama ini kebijakan-kebijakan yang diambil kades tanpa melakukan koordinasi dengan bawahan. Hal ini terkesan tidak transparan. "Saya rasa tidak sejalan dengan hati nurani saya. Dengan apa yang kita sampaikan, kita berikan masukan, dan arahan ternyata beda lagi kebijakan yang telah kita sepakati," jelasnya.

Feriansyah mengaku, surat pengunduran diri dari jabatan sudah disampaikan sejak 12 Juli 2022. Mulai saat itu pun ia sudah tidak lagi melakukan aktivitas di kantor desa. "Pasti

ada ada pelayanan publik di desa yang terhambat. Tapi itu kita sudah tidak mau lagi berurusan. Tinggal kebijakan kepala desa lagi lah itu," ungkapnya.

Kaur Keuangan Desa Tolak, Arisman, mengatakan selama ini kades hanya membuat kebijakan sendiri. Tidak ada komunikasi yang baik sehingga terkesan tidak melibatkan mereka. "Misalnya jika ada orang perusahaan yang berurusan, langsung actions saja. Tidak ada koordinasi dengan kepala wilayah setempat, seperti kepala dusun," ucapnya.

Camat MHU, Rahmad Rohendi memaparkan dari hasil mediasi yang difasilitasi pengunduran perangkat Desa Kuala Tolak diduga karena kades bekerja tidak sesuai prosedur dan aturan serta tidak memfungsikan staf desa sesuai tupoksi.

"Infonya diduga Ibu Kades ini single fighter, semacam manajemen tukang sate dalam mengelola keuangan itu. Begitu uang itu cair baru dia sendiri bekerja, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) desa tidak berfungsi. Perangkat desa yang ada, termasuk kaur keuangannya, sekretaris dan TPK desa," ungkapnya.

Dia menjelaskan, di dalam peraturan desa yang dibuat dalam APBDes tentang kegiatan desa di tahun 2022 terdapat rincian untuk dana BLT DD sebesar itu 40 persen. Kemudian dana Covid-19, 8 persen ditambah lagi untuk dana kesehatan, keagamaan serta

pendidikan. Sisanya kemudian untuk kegiatan pembangunan fisik di desa. "Nah itu dikelola sendiri. Ketika pencairan keuangan, informasi mereka diambil alih oleh Ibu Kades yang kerja, bukan mereka," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya akan segera berkonsultasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang untuk mengatasi kekosongan pelayanan di kantor Desa Kuala Tolak akibat mundurnya perangkat desa. Pihaknya meminta agar masyarakat di desa tersebut untuk tetap tenang.

Apabila membutuhkan pelayanan publik yang berkaitan dengan desa, dapat menghubungi kecamatan apabila kantor desa tidak ada pelayanan. "Harapan kami adanya perbaikan atau rekonsiliasi. Hilangkan ego masing-masing. Bukalah lembar baru. Tidak ada lagi antara yang mendukung atau tidak mendukung, karena ini pemerintahan desa. Jadi jalankan roda pemerintahan desa sesuai tupoksi," ujarnya.

Kedes Kuala Tolak, Kecamatan MHU, Nurhasimah, menyebut pemicu konflik berawal dari adanya salah seorang Kepala Dusun yang dia berikan surat peringatan (SP) untuk kedua kalinya. "Awalnya itu Kadus 2 itu kena SP 2. Itulah jadi provokator mereka itu. Sebenarnya selama ini tidak ada permasalahan," ucapnya.

Mengenai tudingannya

kebijakan yang dibuat tanpa melakukan koordinasi dengan perangkat desa dan menyalahi aturan, menurutnya itu tidak benar. "Itu tidak benar. Karena dari awal mereka itu adalah lawan politik saya saat Pilkada. Jadi dari awal saya masuk ke situ mereka sudah tidak sinkron dengan saya. Jadi saya bekerja susah, seperti menyimpan duri di dalam daging," ujarnya.

Mengenai kabar perangkat desa yang telah tidak aktif memberikan pelayanan di Kantor Desa Kuala Tolak, dirinya membenarkan hal itu. Dia segera mencari perangkat desa yang baru agar roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Selain perangkat desa yang tersisa, pelayanan masyarakat di kantor desa juga dibantu pihak kecamatan.

"Bagi saya yang sudah mengundurkan diri, ya silakan mengundurkan diri. Untuk kedepannya kita tetap akan mencari yang baru, karena yang membuat surat pengunduran diri itu mereka sendiri. Saya pun tanpa dikonfirmasi dari awal, tiba-tiba saja mereka langsung melayangkan surat ke Camat," paparnya.

Dia menambahkan, dalam menjabat sebagai kades dia mengakusasi dengan aturan dan prosedur. "Kalau masalah pembagian tong air itu sebenarnya jalan sudah bagus, cuma tadi ada provokatornya sehingga sebagian yang belum dapat jadi gaduh," pungkasnya. (afi)